

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aartje Tehupeiory, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2014).
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).
- Arikunto, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, jilid I, (Jakarta, Djambatan, 2003).
- Elza syarif, *Pensertifikatan tanah Bekas Hak Eigendom*, (Jakarta, Gramedia, 2014)
- Florianus Sp Sangsun, *Tata Cara Mengurus Tanah*, (Jakarta: Visimedia, 2007)
- J S Sembiring, *Panduan Mengurus Tanah*, (Jakarta: Visimedia, 2010)
- Mhd.Yamin Lubis & Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, (Bandung : CV.Mandar Maju, 2010)
- Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Sugiono, *Metode penelitian*. (Bandung: Alfa Beta, 2015)
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan D & R*, (Bandung : Alfabeta, 2008)
- Urip Santoso, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- _____, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013)
- Yudi Setianto, dkk. *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen*. (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008)

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Loker Pelayanan Pertanahan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 1997

Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

C. Karya Ilmiah

Angga, B. Ch, *Penyelesaian Terhadap Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional*, 2013. Jurnal Lex. Et Societatis, I (5), p. 28-40.

Ariadi, D. *Pembatalan Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Hakim*, Jurnal Repertorium, 2017, IV (2), p. 135-142

Ningrum, H. R. S. *Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2014, (I) 2, p. 219-227.

Soemarga, A. S, *Tingkat Kepuasan Pemohon Pensertifikatan Tanah Pada Kantor Pertanahan*, Jurnal Ilmiah Kel & Kons, 2016, (9) I, p. 53-63

Yuniati, A. *Kekuatan Setifikat Sebagai Alat Bukti Dalam Peneyelesaian Sengketa Tanah*, Jurnal Universitas lampung, 2013. 5 (1) p. 23-35

D. Sumber lain

<https://kbbi.web.id/proses>, diakkses tanggal 26 Juni 2018